

## BAB II LANSKAP SOSIOPOLITIK KEPULAUAN SOLOMON

Sebelum membedah mekanisme agensi negara kecil yang dioperasikan oleh rezim Sogavare, analisis ini terlebih dahulu harus meletakkan fondasi pemahaman yang kokoh mengenai konteks sosiopolitik Kepulauan Solomon sebagai entitas negara yang unik dan penuh paradoks. Bab ini berargumen bahwa manuver diplomatik Honiara yang tampak mengejutkan di permukaan bukanlah sebuah anomali kebijakan yang muncul dari kehampaan; melainkan produk organik dari sejarah panjang disfungsi institusional, fragmentasi identitas, dan logika patron-klien yang mengakar jauh sebelum negara modern ini bahkan diproklamasikan. Untuk memahami mengapa rezim Sogavare memilih Tiongkok, seseorang terlebih dahulu harus memahami apa yang sedang dipertahankan oleh rezim tersebut dan dari mana ancaman sesungguhnya berasal.

Bab ini dibangun di atas dua pilar analitis yang saling mengunci. Pilar pertama memetakan arsitektur sosiopolitik Kepulauan Solomon dalam tatanan regional Pasifik: warisan institusional kolonial yang tidak pernah benar-benar berakar pada realitas Melanesia, dinamika krisis etnis *The Tensions* yang mendefinisikan ulang postur kedaulatan negara ini, hingga strategi partisipasi Honiara dalam forum-forum regional sebagai instrumen penegasan agensi. Pilar kedua mengurai anatomi ancaman domestik yang menjadi obsesi eksistensial rezim Sogavare: kontestasi kekuasaan berbasis patronase yang sarat dengan praktik klientelisme, dinamika otonomi sub-nasional Malaita yang berpotensi menjadi bom

waktu disintegrasi, serta kerusuhan Honiara 2021 sebagai peristiwa katarsis yang secara telanjang memperlihatkan betapa rapuhnya legitimasi koersif pemerintah pusat. Kedua pilar ini secara bersama-sama menyajikan argumen bahwa kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon tidak dapat dipahami secara terpisah dari tekanan domestik yang menghantui kelangsungan hidup rezim yang berkuasa.

## 2.1 Kepulauan Solomon dalam Arsitektur Regional Pasifik

Keberadaan Kepulauan Solomon dalam arsitektur regional Pasifik merupakan manifestasi dari sejarah panjang kegagalan integrasi institusi kolonial dengan realitas sosiopolitik Melanesia yang tetap berakar kuat pada tradisi lokal. Sebagai negara yang meraih kemerdekaan secara damai dari Inggris pada tahun 1978, Solomon Islands mewarisi sistem Westminster yang secara konseptual merupakan model Barat yang dipaksakan dan sering kali dianggap sebagai sebuah "fasad demokrasi" yang tidak selaras dengan norma adat pribumi.<sup>38</sup> Kegagalan adaptasi institusi bentukan Inggris ini berakar pada pengabaian terhadap struktur kepemimpinan tradisional Melanesia yang berbasis pada konsep *Big Man* atau *Mumi*, di mana kekuasaan tidak bersifat institusional-legalistik melainkan personalistik, yang diperoleh melalui kemampuan individu dalam membangun jaringan pengikut melalui kemurahan hati, pertukaran seremonial, dan pengumpulan kekayaan.<sup>39</sup> Ketidaksesuaian antara birokrasi formal yang kaku dengan logika kepemimpinan adat yang dinamis ini menyebabkan runtuhnya

---

<sup>38</sup> Jennifer Corrin Care, "'Off the Peg' or 'Made to Measure': Is the Westminster System of Government Appropriate in Solomon Islands?," *Alternative Law Journal* 27, no. 5 (October 1, 2002): 207–12, <https://doi.org/10.1177/1037969X0202700502>.

<sup>39</sup> Lamont Lindstrom, "'Big Man': A Short Terminological History," *American Anthropologist* 83, no. 4 (December 23, 1981): 900–905, <http://www.jstor.org/stable/676254>.

otoritas negara pada pergantian abad ini, menciptakan ruang hampa yang kemudian diisi oleh elite pribumi yang terbaratkan namun tetap mengoperasionalkan kekuasaan melalui pola patronase tradisional.

Struktur sosiopolitik Kepulauan Solomon pascakolonial dicirikan oleh tegangan dialektis antara harapan terhadap model birokrasi modern dan praktik kontrol sosial tradisional yang bersifat desentralistik.<sup>40</sup> Proses pengembangan konstitusional di Solomon cenderung mengikuti jalur konservatif yang secara sistematis menyingkirkan peran pemimpin adat dari suara di tingkat pemerintahan nasional, sehingga melemahkan legitimasi kultural negara di mata rakyatnya sendiri.<sup>41</sup> Dalam realitas sosiologisnya, masyarakat Solomon lebih patuh pada struktur kekerabatan dan kepemimpinan lokal daripada otoritas abstrak pemerintah pusat di Honiara.<sup>42</sup> Ketimpangan ini menyebabkan pemerintah pusat sering kali dipandang sebagai entitas asing yang dikelola oleh elite kecil, yang memicu sentimen ketidakpuasan di berbagai wilayah dan menjadikan negara ini sebagai aktor yang secara regional dipandang lemah namun secara strategis sangat rentan. Krisis etnis dan keamanan yang dikenal sebagai *The Tensions* (1998-2003) merupakan kulminasi dari kegagalan institusional tersebut, yang sekaligus mendefinisikan ulang posisi Solomon dalam tatanan regional.<sup>43</sup> Ketidakkampuan

---

<sup>40</sup> Sinclair Dinnen, "Dilemmas of Intervention and the Building of State and Nation," in *Politics and State Building in Solomon Islands*, ed. SINCLAIR DINNEN and STEWART FIRTH (ANU Press, 2008), 1–38, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hc7n.8>.

<sup>41</sup> Steffen Dalsgaard, "Local Government and Politics: Forms and Aspects of Authority," in *The Melanesian World* (Routledge, 2019), 255–68.

<sup>42</sup> David Gegeo et al., "Environmental Peacebuilding, Indigenous Epistemologies and Experience: Learning From Ruptures and Resilience in Solomon Islands," *Asia Pacific Viewpoint* 66, no. 1 (April 1, 2025): 130–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/apv.12431>.

<sup>43</sup> Joseph D Foukona, "Truth Telling and Reconciliation in the Pacific: Solomon Islands' Experience," *Journal of Sociology* 60, no. 4 (October 13, 2024): 870–86, <https://doi.org/10.1177/14407833241284437>.

pemerintah pusat untuk menjaga ketertiban memaksa masuknya intervensi eksternal masif melalui *Regional Assistance Mission to Solomon Islands* (RAMSI) yang dipimpin oleh Australia, sebuah periode yang menandai Solomon sebagai negara dengan kedaulatan yang dipandu.<sup>44</sup> Pengalaman berada di bawah kendali keamanan asing selama empat belas tahun menciptakan memori kolektif akan dependensi paternalistik yang mendalam terhadap Canberra. Namun, di bawah permukaan, pengalaman ini justru memicu keinginan kuat di kalangan elite untuk merebut kembali otonomi diplomatik mereka dan mencari alternatif mitra strategis guna menyeimbangkan pengaruh Australia yang dianggap terlalu mendominasi arsitektur keamanan regional selama era pascakonflik.<sup>45</sup>

Sejarah regional Solomon juga mencatat adanya riwayat gerakan separatisme yang berakar pada identitas budaya yang berbeda, seperti gerakan pecahnya wilayah Barat (*Western breakaway movement*) yang menolak merdeka bersama Honiara pada 1978.<sup>46</sup> Dinamika ini menunjukkan bahwa arsitektur internal negara ini sangat rapuh karena pondasi konstitusionalnya tidak pernah benar-benar menyentuh akar rumput Melanesia secara inklusif. Fragmentasi ini menjadi variabel tetap yang harus dikelola oleh setiap pemimpin di Honiara, yang kemudian memaksa mereka untuk menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan di tingkat domestik guna menghindari

---

<sup>44</sup> Mary-Louise O'Callaghan, "RAMSI—the Way Ahead," in *Politics and State Building in Solomon Islands*, ed. SINCLAIR DINNEN and STEWART FIRTH (ANU Press, 2008), 185–93, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hc7n.14>.

<sup>45</sup> Sinclair Dinnen, "The Solomon Islands—RAMSI, Transition and Future Prospects," *Security Challenges* 8, no. 4 (December 23, 2012): 61–72, <http://www.jstor.org/stable/26462891>.

<sup>46</sup> Ralph Premdas, Jeff Steeves, and Peter Larmour, "The Western Breakaway Movement in the Solomon Islands," *Pacific Studies* 7, no. 2 (1984).

disintegrasikan lebih lanjut. Penolakan terhadap simbol-simbol nasional di masa lalu membuktikan bahwa otoritas pusat selalu bersifat tentatif dan harus terus-menerus diperjuangkan melalui distribusi sumber daya yang sering kali bersifat transaksional.

Manuver "The Switch" yang terjadi pada tahun 2019, yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi beralih ke Tiongkok, merupakan guncangan seismik yang meruntuhkan *status quo* dalam arsitektur regional Pasifik. Pada tanggal 16 September 2019, kabinet di bawah pemerintahan Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengadakan pertemuan krusial dan secara resmi melakukan pemungutan suara untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi merapat ke Beijing. Penjajakan dilanjutkan pada tanggal 21 September 2019 di mana Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele—yang kemudian menjadi suksesor Manasseh Sogavare, secara resmi menandatangani komunikasi bersama di Beijing yang meresmikan hubungan diplomatik antara Kepulauan Solomon dan Republik Rakyat Tiongkok. Langkah ini bukan sekadar urusan perdagangan, melainkan bentuk penegasan agensi negara kecil untuk keluar dari orbit pengaruh Barat yang sering kali memberikan tekanan terkait standar tata kelola pemerintahan yang ketat. Dengan meninggalkan Taiwan, rezim Manasseh Sogavare secara sadar memosisikan Solomon sebagai aktor yang dapat mengadu domba kepentingan kekuatan besar demi mendapatkan dukungan yang lebih akomodatif terhadap keberlangsungan politik elite penguasa. Reorientasi ini menunjukkan bahwa tatanan regional tidak lagi bersifat unipolar di bawah Australia, melainkan telah menjadi medan transaksional yang cair di mana

pengakuan diplomatik dipertukarkan dengan akses kapital dan jaminan keamanan baru.<sup>47</sup>

Keanggotaan Kepulauan Solomon dalam organisasi regional seperti *Pacific Islands Forum* (PIF) dan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) kini dioperasionalkan sebagai platform untuk memperkuat identitas sub-regional yang khas. Melalui MSG, Solomon membangun solidaritas sesama negara Melanesia yang memiliki kesamaan nilai kultural dan sering kali digunakan sebagai alat untuk membentengi diri dari intervensi atau kritik negara-negara maju di forum PIF. Strategi ini memungkinkan Honiara untuk menjaga narasi kedaulatan di hadapan tetangganya sambil tetap mempertahankan posisi tawar yang tinggi sebagai salah satu negara paling strategis di Pasifik Selatan.<sup>48</sup> Manuver ini menegaskan bahwa Solomon tidak lagi memandang dirinya sebagai anggota pasif, melainkan aktor yang lihai memanfaatkan berbagai mekanisme kerja sama regional demi menjaga ruang gerak kebijakan domestik yang otonom.

Transformasi posisi Solomon dalam tatanan regional mencerminkan kebangkitan agensi negara kecil yang secara cerdas mengonversi kerentanan struktural mereka menjadi daya tawar geostrategis. Identitas sebagai negara yang berada di jalur komunikasi maritim vital dan memiliki kekayaan sumber daya alam digunakan sebagai komoditas diplomatik untuk memikat kekuatan global seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam arsitektur regional yang semakin

---

<sup>47</sup> Patrick Köllner, "Explaining Sender–Receiver Gaps in Signalling: Australia's 'Pacific Step-up' and Solomon Islands' Multi-Alignment," *British Journal of Politics and International Relations* 27, no. 1 (2025): 20–42, <https://doi.org/10.1177/13691481241254712>.

<sup>48</sup> Jamie Tanguay, "Alternative Indicators of Wellbeing for Melanesia: Cultural Values Driving Public Policy," ed. Lachlan MacDowall et al. (London: Palgrave Macmillan UK, 2015), 162–72, [https://doi.org/10.1007/978-1-137-46458-3\\_11](https://doi.org/10.1007/978-1-137-46458-3_11).

terfragmentasi, Solomon memposisikan diri sebagai pintu masuk bagi pengaruh keamanan Beijing, yang secara otomatis meningkatkan harga tawarnya di mata Washington. Pergeseran ini memaksa kekuatan Barat untuk merumuskan ulang strategi mereka dari semula bersifat mendikte menjadi lebih negosiatif guna mencegah hilangnya pengaruh total di Pasifik Selatan yang kini semakin kompetitif.

Bentrok narasi antara inisiatif *Pacific Step-up* Australia dan kehadiran *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok menjadikan Kepulauan Solomon sebagai episentrum perubahan arsitektur keamanan regional.<sup>49</sup> Rezim Sogavare memanfaatkan kompetisi ini dengan mempraktikkan strategi keberpihakan ganda, tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Beijing sambil mencoba menarik komitmen keamanan dari Canberra, meskipun kepercayaan regional telah tergerus secara signifikan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa tatanan Pasifik telah bermutasi menjadi sistem multipolar di mana loyalitas diplomatik adalah variabel yang bisa dinegosiasikan demi kelangsungan hidup pemerintahan di pusat.<sup>50</sup> Solomon dalam hal ini berperan sebagai katalisator yang mempercepat militerisasi kawasan dan mengaburkan batas antara bantuan pembangunan dengan instrumen keamanan eksternal yang bersifat represif.

---

<sup>49</sup> Bridget Poiohia, Lee Moerman, and Stephanie Perkiss, "Pacific Step-Up: Exploring Geopolitical Accountability for Aid in Solomon Islands," *Social and Environmental Accountability Journal* 42, no. 3 (September 2, 2022): 160–83, <https://doi.org/10.1080/0969160X.2021.1978304>.

<sup>50</sup> Johannes Plagemann, "Introduction to Special Issue: 'Foreign Policy Signaling in the Indo-Pacific: Responses to the US-China Rivalry in a Multipolar World,'" *The British Journal of Politics and International Relations* 27, no. 1 (December 17, 2024): 3–19, <https://doi.org/10.1177/13691481241306387>.

Eksploitasi terhadap dilema keamanan regional merupakan instrumen utama yang digunakan elite di Honiara untuk memperkokoh posisi domestik mereka dari ancaman ketidakpuasan regional yang kronis. Dengan mengamankan pakta keamanan yang memungkinkan kehadiran personel asing, rezim Sogavare secara efektif membangun sebuah perlindungan eksternal yang dapat dikerahkan untuk meredam protes sipil yang berakar dari sentimen etnis maupun ketimpangan ekonomi. Manuver ini membuktikan bahwa bagi elite penguasa, arsitektur regional bukan lagi tentang pencapaian keamanan kolektif antarnegara, melainkan tentang bagaimana akses terhadap kapasitas koersif asing dapat menjamin stabilitas otoritas pusat. Hal ini menciptakan realitas baru di mana kedaulatan negara kecil dipertaruhkan demi kepentingan politik sempit, yang pada gilirannya mengubah arah gerak politik Kepulauan Solomon menjadi semakin transaksional dan menjauh dari norma-norma demokrasi liberal yang diwariskan oleh Inggris.

## **2.2 Dinamika Pendanaan dan Fragmentasi Fiskal Regional**

Pergeseran aliansi diplomatik Kepulauan Solomon dari Taipei ke Beijing pada tahun 2019 telah memicu transformasi struktural yang tidak tertandingi dalam sejarah fiskal negara tersebut, di mana Tiongkok mengonsolidasikan dominasi finansialnya melalui penetrasi kapital yang jauh melampaui akumulasi bantuan selama era Taiwan. Data terbaru mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu hanya enam tahun (2019–2024), Tiongkok telah mencatatkan total pengeluaran sebesar \$228,09 juta, sebuah angka yang melampaui total akumulasi pengeluaran Taiwan selama satu dekade penuh (2010–2019) yang berjumlah \$144,91 juta.<sup>51</sup> Eskalasi

---

<sup>51</sup> Dayant et al., “Lowy Institute Pacific Aid Map: 2024 Key Findings Report.”

pendanaan ini bukan sekadar bantuan pembangunan konvensional, melainkan instrumen politik masif yang dioperasionalkan untuk memperkuat kontrol elite di Honiara, mengingat volume proyek Tiongkok yang mencapai 98 inisiatif strategis secara signifikan melampaui 66 proyek yang dijalankan Taiwan sepanjang periode kemitraannya.<sup>52</sup> Realitas ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya masuk sebagai mitra alternatif, melainkan sebagai penjamin stabilitas fiskal baru yang memiliki kapasitas kapital hampir dua kali lipat lebih agresif dibandingkan pendahulunya.

Anomali pertumbuhan pendanaan ini mencapai puncaknya pada tahun 2023, di mana realisasi pengeluaran Tiongkok menyentuh angka rekor sebesar \$60,20 juta, melampaui puncak pengeluaran tahunan tertinggi Taiwan yang terjadi pada tahun 2012 dengan nilai \$25,94 juta. Lonjakan ekstrem ini mencerminkan percepatan implementasi proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan fasilitas olahraga untuk Pacific Games dan infrastruktur komunikasi yang dirancang untuk memberikan dampak visual instan bagi legitimasi domestik rezim yang berkuasa.<sup>53</sup> Jika dibandingkan secara rata-rata, pengeluaran tahunan Tiongkok pasca-2019 berada pada kisaran \$38–44 juta, yang secara konsisten berada di atas rata-rata tahunan Taiwan yang hanya berkisar antara \$10–15 juta sepanjang periode 2010-2019.<sup>54</sup> Pola ini menegaskan bahwa transisi diplomatik tersebut telah

---

<sup>52</sup> “Chinese Ambassador to Solomon Islands Cai Weiming Publishes an Article ‘Building a Shared Future with Pacific Island Countries: A Stronger China-Solomon Islands Partnership in the New Era,’” Ministry of Foreign Affairs People’s Republic of China, 2025, [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/xw/zwbd/202506/t20250612\\_11646737.html](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/zwbd/202506/t20250612_11646737.html).

<sup>53</sup> Charley Piringi, “China ‘Gifts’ and Cost Concerns: Pacific Games Stir Controversy in Solomon Islands,” *The Guardian*, 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/sep/05/pacific-games-2023-solomon-island-china-cost-controversy>.

<sup>54</sup> Dayant et al., “Lowy Institute Pacific Aid Map: 2024 Key Findings Report.”

mengonversi ketergantungan bantuan menjadi ketergantungan kapital masif yang secara langsung membiayai ambisi politik jangka pendek pemerintah pusat.

**Tabel 2.1 Perbandingan Kumulatif Pendanaan Tiongkok vs Taiwan**

Parameter Perbandingan	Tiongkok (2019–2024)	Taiwan (2010–2019)	Selisih/Tren
<b>Total Realisasi Pengeluaran</b>	\$228.097.229	\$144.916.434	+\$83,1 Juta (Tiongkok Dominan)
<b>Total Komitmen Anggaran</b>	\$217.577.997	\$154.762.630	+\$62,8 Juta (PRC Lead)
<b>Puncak Pengeluaran Tahunan</b>	\$60.206.945 (2023)	\$25.948.892 (2012)	Tiongkok 2,3x Lebih Agresif
<b>Jumlah Proyek Strategis</b>	98 Proyek	66 Proyek	Ekspansi Sektor yang Masif
<b>Dukungan Anggaran Langsung (2024)</b>	\$20.502.757	-	Fokus pada Stabilitas Rezim
<b>Rata-rata Pengeluaran Tahunan</b>	~\$38,01 Juta	~\$14,49 Juta	Peningkatan Likuiditas 162%

Sumber: Lowy Institute

Efisiensi dan kecepatan eksekusi proyek Tiongkok menjadi variabel pembeda utama, di mana pada tahun 2020 dan 2021 status penyelesaian proyek mencapai angka mutlak 100 persen, sebuah performa yang sangat kontras dengan fluktuasi efisiensi Taiwan yang sering kali terjebak dalam hambatan birokrasi.<sup>55</sup> Dengan total komitmen yang masih berjalan sebesar \$217,57 juta, Tiongkok telah membangun cadangan modal yang memungkinkan Honiara untuk membiayai agenda pembangunannya tanpa harus tunduk pada standar akuntabilitas ketat yang biasanya disyaratkan oleh donor tradisional Barat atau mitra sebelumnya. Fenomena ini menciptakan ruang diskresi fiskal yang luas bagi elite penguasa untuk mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor strategis yang memperkuat jaringan

<sup>55</sup> John Auge and Leon Li, "Erasing Taiwan: Implications of a Growing China-Solomon Islands Partnership," *The Diplomat*, 2025, <https://thediplomat.com/2025/01/erasing-taiwan-implications-of-a-growing-china-solomon-islands-partnership/>.

patronase mereka, terutama melalui mekanisme dukungan anggaran langsung yang bersifat sangat transaksional.

Dinamika pendanaan ini secara langsung menyentuh program *Rural Constituency Development Fund* (RCDF), sebuah dana hibah pembangunan yang dikendalikan secara diskresioner oleh 50 anggota parlemen tanpa mekanisme pengawasan birokrasi yang memadai.<sup>56</sup> Data anggaran mengungkap bahwa Tiongkok melakukan injeksi dana strategis ke dalam program dukungan konstituensi (RSCD) dengan total pengeluaran mencapai kurang lebih \$39,6 juta sepanjang periode 2019-2022.<sup>57</sup> Suntikan dana tahunan yang rata-rata mencapai \$12 juta pada periode awal pasca-perpindahan diplomatik ini secara efektif mengambil alih peran *cheque-book diplomacy* yang sebelumnya dijalankan oleh Taiwan untuk menjaga loyalitas anggota parlemen.

Diplomasi buku cek ini merupakan sebuah bentuk kompetisi bantuan internasional di mana pemberian dana hibah atau investasi digunakan secara transaksional untuk "membeli" atau mempertahankan pengakuan diplomatik dari negara-negara kecil yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap bantuan luar negeri.<sup>58</sup> Praktik ini melibatkan upaya pemberian modal dalam volume besar sebagai imbalan atas kesetiaan diplomatik, yang dalam persaingan Tiongkok-Taiwan, sering kali berujung pada peralihan pengakuan negara mikro dari satu

---

<sup>56</sup> "China's SBD\$80 Million Rural Development Program Enters Second Phase in Solomon Islands," In Depth Solomon, 2025, <https://indepthsolomons.com.sb/chinas-sbd80-million-rural-development-program-enters-second-phase-in-solomon-islands/>.

<sup>57</sup> "Chinese Government Provides 100 Water Tanks and Construction Materials for Gizo-Kolombangara Constituency under Rural Sustainable Development Program," China Aid Data, 2023, <https://china.aiddata.org/projects/107038>.

<sup>58</sup> Saber Salem, "Chinese Foreign Aid to Fiji: Threat or Opportunity," *China Report* 56, no. 2 (2020): 242–58, <https://doi.org/10.1177/0009445520916875>.

pihak ke pihak lain demi mendapatkan bantuan ekonomi yang lebih menguntungkan.<sup>59</sup> Dengan mengadopsi metode investasi yang bersifat "tangan besi", pemberi bantuan berupaya mengunci negara penerima di dalam orbit diplomatik mereka melalui instrumen finansial yang langsung menysar kebutuhan stabilitas politik domestik para elite.<sup>60</sup> Strategi ini pada akhirnya mengonversi bantuan pembangunan menjadi alat koersif untuk menjaga stabilitas rezim di tengah tekanan oposisi, menjebak para aktor politik dalam ketergantungan kronis terhadap donor eksternal guna mempertahankan basis dukungan elektoral mereka.<sup>61</sup>

Instrumen RCDF ini menciptakan fragmentasi fiskal yang tajam di tingkat regional karena alokasinya didistribusikan secara rata per daerah pemilihan, bukan berdasarkan kebutuhan teknokratis objektif tiap provinsi. Pola distribusi ini menyebabkan provinsi dengan jumlah kursi parlemen terbanyak memiliki kontrol yang jauh lebih besar terhadap aliran modal pembangunan dibandingkan wilayah lainnya. Mengingat total 50 kursi parlemen yang tersedia, disparitas ini menempatkan wilayah seperti Malaita, Western, dan Guadalcanal sebagai pemegang kendali utama atas porsi anggaran donor yang mengalir melalui mekanisme CDF. Hal ini memperparah ketimpangan antardaerah dan menjadikan bantuan luar negeri sebagai proksi dari pertarungan kekuasaan antara elite pusat dan elite daerah yang memperebutkan akses terhadap rente pembangunan.

---

<sup>59</sup> Timothy S. Rich and Vasabjit Banerjee, "Running out of Time? The Evolution of Taiwan's Relations in Africa," *Journal of Current Chinese Affairs* 44, no. 1 (2015): 141–61, <https://doi.org/10.1177/186810261504400106>.

<sup>60</sup> Efem N. Ubi, "Foreign Aid and Development in Sino-African Relations," *Journal of Developing Societies* 30, no. 3 (2014): 243–72, <https://doi.org/10.1177/0169796X14536971>.

<sup>61</sup> Zhou Yiqi, "China's Partnership Diplomacy and the Formation of Gulf Regional Order," *Alternatives*, no. 195 (2025): 1–23, <https://doi.org/10.1177/03043754251406817>.

Evolusi mekanisme pendanaan Tiongkok juga terlihat melalui pengenalan *Rural Sustainable Development Program* (RSDP) yang mulai mendominasi alokasi anggaran sejak tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024, Beijing mencatatkan komitmen bantuan RSDP senilai SBD 80 juta (setara \$9,5 juta).<sup>62</sup> Pergeseran dari bantuan proyek fisik menuju dukungan anggaran langsung ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi rezim untuk mengelola gejolak politik domestik tanpa pengawasan ketat dari publik maupun institusi pengawas internasional. Dengan demikian, posisi Tiongkok telah bergeser dari sekadar donor infrastruktur menjadi penjamin kelangsungan fiskal negara yang memfasilitasi bertahannya sistem klientelisme di Honiara.

Ketimpangan kontrol fiskal regional yang berbasis pada sebaran konstituensi ini menempatkan Provinsi Malaita dengan 14 kursi sebagai penerima manfaat terbesar secara agregat, mengontrol sekitar 28% dari total dana RCDF nasional. Diikuti oleh Provinsi Western dengan 9 kursi (18%) dan Guadalcanal dengan 8 kursi (16%), ketiga wilayah ini menjadi episentrum distribusi modal yang paling diperebutkan oleh para elite. Sebaliknya, wilayah marginal seperti Provinsi Central dengan 2 kursi (4%) dan Rennell-Bellona dengan hanya 1 kursi (2%) memiliki daya tawar fiskal yang sangat lemah dalam struktur politik nasional.<sup>63</sup> Pola ini menciptakan insentif bagi para legislator untuk terus bersikap pragmatis dan mencari patronase asing guna memastikan aliran dana ke daerah pemilihan mereka tidak terputus.

---

<sup>62</sup> “China’s PSDP Pumps \$80m into Rural Areas,” Solomon Star News, 2025, <https://www.solomonstarnews.com/chinas-psdp-pumps-80m-into-rural-areas/>.

<sup>63</sup> “Solomon Islands Development Finance Assessment” (New York, 2016), <https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/solomon-islands-dfa.pdf>.

Tabel 2.2 Distribusi Anggaran RCDF Setiap Provinsi

Provinsi/Daerah Administratif	Jumlah Kursi (Konstituensi)	Persentase Kontrol Dana	Dampak Politik Lokal
Malaita	14	28%	Pusat oposisi utama dan sentimen separatisme
Western	9	18%	Riwayat gerakan separatisme pascakolonial
Guadalcanal	8	16%	Episentrum ketegangan etnis dan akses ibu kota
Makira-Ulawa	4	8%	Wilayah dengan dependensi patronase menengah
Choiseul	3	6%	Wilayah pinggiran dengan loyalitas transaksional
Isabel	3	6%	Wilayah pinggiran dengan loyalitas transaksional
Temotu	3	6%	Wilayah pinggiran dengan loyalitas transaksional
Honiara	3	6%	Titik kumpul massa dan kerawanan protes sipil
Central	2	4%	Representasi politik marginal di tingkat pusat
Rennell-Bellona	1	2%	Representasi politik marginal di tingkat pusat
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>Pondasi sistem patronase nasional</b>

Sumber: Solomon Islands Electoral Commission (SIEC)

Struktur sosiopolitik yang rapuh ini menjadikan kedaulatan negara kecil sebagai komoditas diplomatik yang dipertukarkan demi mendapatkan akses kapital untuk mempertahankan otoritas pusat. Kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon akhirnya tidak lagi mencerminkan kepentingan nasional yang holistik, melainkan menjadi perpanjangan tangan dari kebutuhan finansial jangka pendek para elite untuk membendung mosi tidak percaya di parlemen. Ketergantungan akut pada aliran bantuan transaksional ini menjebak negara dalam siklus dependensi baru yang mengancam kedaulatan jangka panjang karena setiap keputusan strategis harus dikalkulasi berdasarkan dampaknya terhadap pengisian kas RCDF. Realitas ini menunjukkan bahwa integrasi bantuan Tiongkok telah secara permanen

mengubah logika perpolitikan domestik Solomon menjadi semakin transaksional dan menjauh dari standar tata kelola pemerintahan yang baik.

Perbandingan data agregat antara era Taiwan dan Tiongkok membuktikan adanya peningkatan likuiditas politik yang memungkinkan rezim Sogavare untuk mengonsolidasi kekuasaan secara lebih efektif. Dengan total realisasi pengeluaran Tiongkok yang telah mencapai \$228,09 juta dalam waktu singkat, kapasitas fiskal untuk menjalankan praktik klientelisme telah berlipat ganda dibandingkan dekade sebelumnya. Fragmentasi fiskal yang timbul dari distribusi dana berbasis kursi parlemen ini memastikan bahwa stabilitas domestik akan tetap bergantung pada kemampuan elite dalam mengelola persaingan kekuatan besar guna mengamankan aliran rente politik dari donor eksternal.

### **2.3 Dinamika Politik Domestik**

Dinamika politik domestik di Kepulauan Solomon merupakan manifestasi nyata dari sejarah panjang kegagalan integrasi antara institusi kolonial bentukan Inggris dengan realitas sosiopolitik Melanesia yang tetap berakar kuat pada tradisi lokal. Sebagai negara yang meraih kemerdekaan pada tahun 1978, Solomon mewarisi sistem Westminster yang secara konseptual sering kali dianggap sebagai "fasad demokrasi" karena dipaksakan tanpa penyesuaian dengan norma adat pribumi.<sup>64</sup> Kondisi ini diperparah oleh status negara ini sebagai salah satu wilayah dengan kualitas tata kelola pemerintahan terburuk di kawasan Pasifik, yang ditandai dengan lambatnya perbaikan indikator pemerintahan standar selama beberapa

---

<sup>64</sup> Care, "'Off the Peg' or 'Made to Measure': Is the Westminster System of Government Appropriate in Solomon Islands?"

dekade terakhir.<sup>65</sup> Struktur sosiopolitik pascakolonial akhirnya terjebak dalam tegangan dialektis antara ekspektasi birokrasi modern yang legalistik dengan praktik kontrol sosial tradisional yang bersifat desentralistik, menciptakan jurang pemisah yang lebar antara rakyat dan negara. Akibatnya, masyarakat cenderung lebih patuh pada struktur kekerabatan dan kepemimpinan lokal dibandingkan otoritas abstrak pemerintah pusat di Honiara, yang sering kali dipandang sebagai entitas asing yang dikelola oleh segelintir elite.<sup>66</sup>

Krisis legitimasi yang dialami pemerintah pusat secara konsisten berbenturan dengan sentimen kedaulatan lokal, memicu instabilitas politik kronis yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik terbuka.<sup>67</sup> Proses pengembangan konstitusional di negara ini cenderung mengikuti jalur konservatif yang secara sistematis menyingkirkan peran pemimpin adat dari pengambilan keputusan di tingkat nasional.<sup>68</sup> Hal ini melemahkan legitimasi kultural negara di mata rakyatnya sendiri, menjadikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sering kali kehilangan basis dukungan moral di tingkat akar rumput. Karena otoritas pusat selalu bersifat tentatif, kekuasaan di tingkat nasional harus terus-menerus diperjuangkan melalui distribusi sumber daya yang bersifat

---

<sup>65</sup> Alistair Brown, "The Accountable Governance of Provincial Governments of a Pacific Island Country," *Public Money & Management* 41, no. 1 (January 2, 2021): 55–64, <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665363>.

<sup>66</sup> Alexis Tucker Sade, "Encountering Chiefs in (a Search for) the State," *Anthropologica* 61, no. 2 (January 17, 2019): 200–212, <https://www.jstor.org/stable/26900126>.

<sup>67</sup> Sinclair Dinnen and Matthew Allen, "Reflections on Hybridity as an Analytical Lens on State Formation: The Case of Solomon Islands," in *Hybridity on the Ground in Peacebuilding and Development*, ed. JOANNE WALLIS et al., Critical Conversations (ANU Press, 2018), 129–44, <http://www.jstor.org/stable/j.ctvgd1g9.13>.

<sup>68</sup> Shahar Hameiri and Lee Jones, "Against Hybridity in the Study of Peacebuilding and Statebuilding," in *Hybridity on the Ground in Peacebuilding and Development*, ed. JOANNE WALLIS et al., Critical Conversations (ANU Press, 2018), 99–112, <http://www.jstor.org/stable/j.ctvgd1g9.11>.

transaksional demi menjaga loyalitas berbagai faksi politik.<sup>69</sup> Fenomena ini menempatkan negara dalam posisi strategis namun sangat rentan terhadap guncangan domestik maupun intervensi aktor eksternal.

Struktur kekuasaan di Honiara sangat dipengaruhi oleh pola patronase personalistik masif yang melintasi batas-batas institusi formal.<sup>70</sup> Praktik klientelisme menjadi fitur sentral dalam perpolitikan Solomon, di mana sebagian besar pemilih memberikan suara demi mendapatkan manfaat material yang bersifat personal atau lokal bagi komunitas mereka.<sup>71</sup> Kondisi ini menciptakan insentif bagi para politisi nasional untuk lebih fokus pada penyampaian keuntungan langsung kepada pengikutnya daripada memprioritaskan fungsi legislasi, kebijakan nasional, atau pengawasan kinerja birokrasi. Pemilih memiliki preferensi yang jelas terhadap manfaat partikularistik yang dapat dikecualikan bagi keluarga atau unit kecil mereka dibandingkan kebijakan publik yang bersifat nasional.<sup>72</sup> Akibatnya, stabilitas domestik menjadi sangat bergantung pada kemampuan rezim yang berkuasa untuk terus mendistribusikan rente politik melalui dana bantuan luar negeri guna membendung potensi mosi tidak percaya di parlemen.

---

<sup>69</sup> Rebecca Monson, "The Politics of Property: Gender, Land and Political Authority in Solomon Islands," in *Kastom, Property and Ideology*, ed. SIOBHAN MCDONNELL, MATTHEW G ALLEN, and COLIN FILER, Land Transformations in Melanesia (ANU Press, 2017), 383–404, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1pwtd1p.19>.

<sup>70</sup> Steven Ratuva, "Longing for Peace: Transformation of the Solomon Islands Security Environment," in *Contested Terrain*, Reconceptualising Security in the Pacific (ANU Press, 2019), 205–50, <http://www.jstor.org/stable/j.ctvq4c0m7.9>.

<sup>71</sup> Wood, "The Clientelism Trap in Solomon Islands and Papua New Guinea, and Its Impact on Aid Policy."

<sup>72</sup> Wouter Veenendaal and Jack Corbett, "Clientelism in Small States: How Smallness Influences Patron–Client Networks in the Caribbean and the Pacific," *Democratization* 27, no. 1 (January 2, 2020): 61–80, <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1631806>.

Fragmentasi politik memaksa Honiara untuk mengoperasionalkan kebijakan luar negeri sebagai alat pertahanan guna memperkuat cengkeraman kekuasaan di tingkat domestik.<sup>73</sup> Pengalaman sejarah mencatat adanya gerakan separatisme yang kuat, seperti gerakan pecahnya wilayah Barat (*Western breakaway movement*) pada 1978 yang menolak bergabung dengan Honiara saat kemerdekaan.<sup>74</sup> Dinamika ini membuktikan bahwa arsitektur internal negara sangat rapuh karena pondasi konstitusionalnya tidak pernah benar-benar menyentuh akar rumput Melanesia secara inklusif.<sup>75</sup> Setiap kebijakan nasional, termasuk pilihan mitra diplomatik, harus dikalkulasi secara presisi berdasarkan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan antar faksi etnis dan daerah guna menghindari disintegrasi lebih lanjut. Oleh karena itu, loyalitas diplomatik sering kali menjadi variabel yang bisa dinegosiasikan demi kelangsungan hidup pemerintahan di pusat dan stabilitas kekuasaan elite.

### 2.3.1 Kerusuhan Honiara 2021

Ledakan kekerasan massa di ibu kota pada 24-27 November 2021 merupakan kulminasi dari akumulasi rasa frustrasi sosiopolitik yang mendalam, terutama di kalangan masyarakat Provinsi Malaita.<sup>76</sup> Aksi ini bermula dari gelombang protes massa yang secara eksplisit menuntut pengunduran diri Perdana

---

<sup>73</sup> Stewart Firth, "Instability in the Pacific Islands." (Lowy Institute for International Policy, January 17, 2018), <http://www.jstor.org/stable/resrep19791>.

<sup>74</sup> Ian Scales, "The Coup Nobody Noticed: The Solomon Islands Western State Movement," *The Journal of Pacific History* 42, no. 2 (September 1, 2007): 187–209, <https://doi.org/10.1080/00223340701461643>.

<sup>75</sup> Eric Hirsch, *The Melanesian World*, 1st ed. (Routledge, 2019), <https://doi.org/10.4324/9781315529691>.

<sup>76</sup> Walton and Hushang, "Long Live RAMSI? Peace-Building, Anti-Corruption and Political Will in Solomon Islands."

Menteri Manasseh Sogavare sebagai bentuk penolakan terhadap arah kebijakan luar negeri yang dianggap terlalu menguntungkan kepentingan Beijing.<sup>77</sup> Ketidakpuasan ini berakar pada persepsi bahwa aspirasi lokal di tingkat provinsi secara sistematis diabaikan oleh elite penguasa pasca-manuver "The Switch" tahun 2019 yang memutus hubungan dengan Taiwan. Kegagalan negara dalam menyediakan layanan publik dasar dan pembangunan yang merata menciptakan kondisi di mana masyarakat tidak lagi dapat mengandalkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fundamental mereka. Fenomena ini mencerminkan krisis legitimasi yang akut, di mana keputusan strategis nasional dianggap tidak lagi mencerminkan kepentingan inklusif seluruh elemen masyarakat Melanesia.

Eskalasi anarkisme yang terjadi di pusat kota dengan cepat menyasar kawasan Chinatown sebagai titik fokus kemarahan massa terhadap pengaruh ekonomi Tiongkok yang kian dominan.<sup>78</sup> Penjarahan dan pembakaran bangunan di area tersebut dioperasionalkan sebagai simbol perlawanan terhadap penetrasi kapital asing yang dipandang sebagai penyokong utama stabilitas rezim di Honiara. Secara sosiologis, penghancuran simbol-simbol ekonomi ini merupakan manifestasi dari kemarahan terhadap struktur patronase yang memfasilitasi dominasi ekonomi pihak luar di atas kerentanan domestik. Para pemilih yang merasa terasing dari manfaat pembangunan nasional cenderung mengekspresikan rasa frustrasinya melalui tindakan destruktif terhadap entitas yang dianggap sebagai

---

<sup>77</sup> "Solomon Islands PM Survives No-Confidence Vote after Unrest," Al Jazeera, 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/6/solomon-islands-pm-faces-no-confidence-vote-after-unrest>.

<sup>78</sup> Wayne Chang and Johnny Hallam, "3 Burned Bodies Found in Solomon Islands' Chinatown Following Days of Violent Protests," CNN World, 2021, <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/country/solomon-islands/#5.368/161.257/-9.228>.

kepanjangan tangan kepentingan elite pusat.<sup>79</sup> Tindakan massa ini menyingkap kebencian mendalam terhadap praktik "*chequebook diplomacy*" yang dianggap merusak integritas institusi demokrasi di Kepulauan Solomon.

Situasi keamanan yang tidak terkendali tersebut menelanjangi kelemahan mendasar dari aparat keamanan domestik yang terfragmentasi secara etnis dan tidak mampu menjaga ketertiban secara mandiri. Bagi rezim Sogavare, ketidakmampuan kepolisian lokal dalam meredam kerusuhan merupakan ancaman eksistensial yang membuktikan bahwa otoritas negara berada di titik nadir.<sup>80</sup> Pengalaman traumatis ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kekuatan koersif yang solid, keberlangsungan kekuasaan di Honiara akan terus berada di bawah bayang-bayang pemberontakan sipil yang dipicu oleh sentimen kedaulatan lokal. Hal ini mencerminkan masalah tata kelola pemerintahan yang kronis di mana menteri dan anggota parlemen sering kali lebih fokus pada kepentingan pendukungnya daripada kinerja departemen keamanan atau kebijakan nasional.<sup>81</sup> Negara kehilangan monopoli atas kekerasan sah, memicu ruang hampa otoritas yang sebelumnya pernah terjadi pada masa krisis etnis *The Tensions* antara tahun 1998 hingga 2003.<sup>82</sup>

Kegagalan respons internal tersebut menjadi katalisator utama bagi pemerintah pusat untuk segera mencari jaminan perlindungan baru di luar

---

<sup>79</sup> William Yuen Yee, "Trouble in Paradise: China's Influence and Unrest in the Solomon Islands," Jamestown Institute, 2022, <https://jamestown.org/trouble-in-paradise-chinas-influence-and-unrest-in-the-solomon-islands/>.

<sup>80</sup> "Australia to Send Troops and Police to Solomon Islands amid Unrest," ABC News, accessed January 17, 2026, <https://www.abc.net.au/news/2021-11-25/australia-to-send-defence-police-to-solomon-islands/100651476>.

<sup>81</sup> Terence Wood, "The Cruel Ironies of the 2021 Honiara Riots," Devpolicy, 2021, <https://devpolicy.org/cruel-ironies-of-the-2021-honiara-riots-20211203/>.

<sup>82</sup> Patricia O'Brien, "The Deep Roots of the Solomon Islands' Ongoing Political Crisis," Center for Strategic and International Studies, 2021, <https://www.csis.org/analysis/deep-roots-solomon-islands-ongoing-political-crisis>.

mekanisme tradisional regional. Pengalaman berada di bawah kendali keamanan asing melalui RAMSI selama empat belas tahun telah menciptakan memori kolektif akan dependensi paternalistik yang mendalam terhadap Canberra.<sup>83</sup> Namun, dalam konteks krisis 2021, elite di Honiara secara pragmatis beralih pada Tiongkok untuk mengamankan pakta keamanan pada tahun 2022 guna memastikan perlindungan terhadap stabilitas rezim dari ancaman domestik. Langkah ini dioperasionalkan sebagai instrumen koersif yang dapat dikerahkan untuk meredam protes sipil serupa di masa depan yang berakar dari sentimen etnis maupun ketimpangan ekonomi. Diversifikasi mitra keamanan ini mencerminkan keinginan kuat elite untuk merebut kembali otonomi diplomatik dan menyeimbangkan pengaruh kekuatan tradisional yang dianggap terlalu mendikte.

Tabel 2.3 Ringkasan Detail Kerusuhan Honiara 2021

Aspek	Deskripsi
Pemicu Utama	Akumulasi frustrasi Provinsi Malaita terhadap kebijakan "The Switch" 2019 dan pengabaian aspirasi lokal.
Target Serangan	Kawasan Chinatown di Honiara sebagai simbol dominasi ekonomi Tiongkok dan dukungan terhadap rezim pusat.
Kelemahan Internal	Fragmentasi etnis di dalam aparat keamanan domestik yang mengakibatkan kegagalan pengendalian massa.
Konsekuensi Politik	Munculnya ancaman eksistensial terhadap kekuasaan PM Sogavare dan tuntutan pengunduran diri.
Respons Strategis	Percepatan penandatanganan pakta keamanan dengan Tiongkok (2022) sebagai pelindung stabilitas rezim.
Dampak Regional	Memicu dilema keamanan regional dan mempercepat militerisasi di kawasan Pasifik Selatan.

### 2.3.2 Oposisi Politik

Eksistensi faksi yang tidak terafiliasi secara permanen mendefinisikan karakter utama oposisi politik di Kepulauan Solomon, di mana struktur aliansi

<sup>83</sup> Dinnen, "The Solomon Islands—RAMSI, Transition and Future Prospects."

bersifat sangat cair dan sering kali bergantung pada kepentingan personal jangka pendek. Kondisi ini berakar pada ketiadaan partai politik nasional yang kohesif, sehingga hubungan antar aktor politik lebih banyak didorong oleh kesetiaan pribadi dan oportunisme daripada ideologi platform yang matang.<sup>84</sup> Akibatnya, kelompok oposisi sering kali bertindak sebagai kumpulan individu atau faksi daerah yang dipersatukan oleh keinginan bersama untuk merongrong stabilitas rezim yang sedang berkuasa di Honiara. Fenomena ini menciptakan tantangan konstan bagi pemerintah pusat, karena ancaman terhadap otoritas tidak datang dari satu blok yang terorganisir, melainkan dari berbagai arah yang sulit diprediksi secara institusional.

Tokoh-tokoh strategis yang berafiliasi erat dengan kepemimpinan di Provinsi Malaita, seperti Daniel Suidani, memosisikan diri sebagai garda terdepan dalam menantang legitimasi pemerintah pusat.<sup>85</sup> Adapun oposisi lain selain Daniel Suidani yaitu Matthew Wale, pemimpin oposisi di Parlemen yang secara persisten memobilisasi mosi tidak percaya dengan menyoroti defisit transparansi dan dugaan korupsi di balik kesepakatan diplomatik tersebut; Peter Kenilorea Jr., Ketua Komite Hubungan Luar Negeri yang menggunakan landasan argumentasi legal-normatif untuk membentengi sistem demokrasi tradisional dari pengaruh otoriter; serta Rick Houenipwela, mantan Perdana Menteri yang mengkritisi risiko jebakan utang dan instabilitas fiskal jangka panjang akibat model pembangunan infrastruktur Beijing

---

<sup>84</sup> Sinclair Dinnen and Stewart Firth, *Politics and State Building in Solomon Islands* (ANU Press, 2008), <http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hc7n>.

<sup>85</sup> Charley Piringi, "Protests in Solomon Islands as Key China Critic Politician Is Ousted in No Confidence Vote," *The Guardian*, 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/feb/07/protests-in-solomon-islands-as-key-china-critic-politician-is-ousted-in-no-confidence-vote>.

yang agresif.<sup>86</sup> Mereka secara efektif mengonversi isu kedaulatan nasional dan penetrasi pengaruh Tiongkok menjadi senjata politik primer guna memobilisasi massa dan menarik simpati internasional.<sup>87</sup> Dengan memanfaatkan sentimen identitas budaya yang kuat, pemimpin oposisi di daerah mampu menciptakan basis perlawanan yang persisten terhadap setiap agenda strategis yang diusung oleh rezim Manasseh Sogavare.<sup>88</sup>

Kapitalisasi isu tersebut mentransformasi lanskap politik Solomon, di mana perdebatan kebijakan luar negeri tidak lagi terbatas pada ruang sidang parlemen, melainkan bermutasi menjadi isu populis yang mampu menggerakkan massa ke jalanan. Sayangnya, ketika tekanan publik menguat, jalur konstitusional untuk menggulingkan pemerintah melalui mekanisme mosi tidak percaya justru kerap menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan oleh kuatnya kontrol rezim terhadap distribusi sumber daya transaksional di parlemen, yang menjebak para anggota legislatif dalam insentif finansial untuk mengamankan loyalitas suara.<sup>89</sup> Akibatnya, tantangan legislatif dari oposisi cenderung mudah dipatahkan di meja parlemen.

Kebuntuan di tingkat parlementer ini menjadi titik balik yang mendorong oposisi untuk mengalihkan strategi dengan memperkuat tekanan melalui jalur non-formal dan penggalangan kekuatan berbasis massa di tingkat provinsi. Tekanan konstan dari luar sistem formal ini memaksa rezim untuk terus berada dalam posisi

---

<sup>86</sup> Edward Acton Cavanaugh, *Divided Isles: Solomon Islands and the China Switch* (Schwartz Books Pty Ltd (Black Inc.), 2023).

<sup>87</sup> Tiffanie Turnbull, "Manasseh Sogavare: Solomon Islands PM Accuses Australia of Interference," BBC News, 2022, <https://www.bbc.com/news/world-australia-62804776>.

<sup>88</sup> Kirsty Needham, "Solomon Islands Opposition Parties Combine in Race to Form Government," Reuters, 2024, <https://www.bbc.com/news/world-australia-62804776>.

<sup>89</sup> Stephen Dziedzic and Chrisnrita Aumanu-Leong, "China Accused of Foreign Interference in Solomon Islands after Minister Quits International Group," ABC News, 2025.

defensif dan menguras energi politik yang besar guna memitigasi risiko pembangkangan sipil di daerah-daerah kunci. Eskalasi tekanan inilah yang pada akhirnya menjadi variabel penentu yang mendorong pemerintah pusat untuk mencari dukungan keamanan internasional yang lebih akomodatif sebagai strategi pertahanan terakhir.<sup>90</sup>

Upaya formal untuk menggulingkan pemerintah melalui mekanisme mosi tidak percaya sering kali menemui jalan buntu akibat kuatnya kontrol rezim terhadap distribusi sumber daya transaksional di parlemen.<sup>91</sup> Para anggota parlemen sering kali terjebak dalam insentif finansial yang disediakan oleh pemerintah untuk mengamankan loyalitas suara, sehingga tantangan legislatif dari oposisi cenderung mudah dipatahkan. Namun, kegagalan di tingkat parlementer ini justru mendorong oposisi untuk memperkuat tekanan melalui jalur non-formal dan penggalangan kekuatan di tingkat provinsi. Tekanan konstan dari luar sistem formal ini memaksa rezim untuk terus berada dalam posisi defensif dan mengalokasikan energi yang besar guna memitigasi risiko pembangkangan sipil di daerah-daerah kunci.

### 2.3.3 Clientilism Trap

Lanskap politik Kepulauan Solomon secara sistemik terperangkap dalam fenomena *clientelism trap*, sebuah kondisi struktural di mana distribusi dana pembangunan dialihkan fungsinya menjadi instrumen patronase politik murni demi

---

<sup>90</sup> Dubravka Voloder, "Solomon Islands' Deadly Riots Bring Back Memories for Those Who Fled the Country's Ethnic Tensions 20 Years Ago," ABC News, 2021, <https://www.abc.net.au/news/2021-11-30/honiaras-deadly-riots-echo-ethnic-tensions-of-20-years-ago/100658298>.

<sup>91</sup> "Solomon Islands PM Survives No-Confidence Vote after Unrest," BBC News, 2021, <https://www.bbc.com/news/world-asia-59501054>.

menjaga stabilitas loyalitas elektoral.<sup>92</sup> Fenomena ini tidak sekadar muncul sebagai anomali sesaat, melainkan telah melembaga menjadi budaya politik di mana pemilih memberikan dukungan suara berdasarkan ekspektasi manfaat material yang bersifat personal atau lokal.<sup>93</sup> Sebaliknya, politisi merespons insentif tersebut dengan memprioritaskan penyampaian manfaat langsung kepada basis pendukung mereka, sering kali dengan mengorbankan kualitas tata kelola nasional yang lebih luas. Fitur sentral dari mekanisme ini adalah pertukaran kontingen, di mana barang publik didistribusikan secara eksklusif kepada individu, keluarga, atau klan tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik, sebuah praktik yang mengakibatkan kualitas pemerintahan di Kepulauan Solomon stagnan di level yang rendah dan sulit mengalami perbaikan substantif.<sup>94</sup>

Jantung operasional yang menggerakkan sistem patronase ini adalah *Rural Constituency Development Fund* (RCDF), yang menjadi tulang punggung bagi bertahannya sistem patronase politik di tingkat akar rumput. Dalam praktiknya, RCDF telah bertransformasi menjadi sumber daya paling vital bagi para legislator untuk menjalankan politik transaksional di daerah pemilihan masing-masing. Penguasaan mutlak atas dana konstituensi ini memungkinkan anggota parlemen untuk membangun jaringan pengaruh yang kokoh, menciptakan relasi kuasa di mana konstituen menjadi lebih bergantung pada "kemurahan hati" personal wakil rakyatnya dibandingkan pada fungsi pelayanan institusi negara yang formal.

---

<sup>92</sup> Wood, "The Clientelism Trap in Solomon Islands and Papua New Guinea, and Its Impact on Aid Policy."

<sup>93</sup> Tony HiriAsia, *The Cost of Politics in Solomon Island* (London: Westminster Foundation for Democracy, 2025).

<sup>94</sup> Tony HiriAsia, "Understanding the Kin-Based Politics of Solomon Islands — The Case of East AreAre" (Canberra, 2016), <https://doi.org/10.25911/5f20027c5531b>.

Dinamika patronase ini mengalami pergeseran pada tahun 2021, ketika data anggaran menyingkap masuknya Tiongkok sebagai aktor kunci baru yang menyuntikkan dana sebesar \$11,3 juta secara langsung ke dalam skema CDF.<sup>95</sup> Injeksi modal asing ini secara efektif menggantikan peran *chequebook diplomacy* yang selama puluhan tahun dijalankan oleh Taiwan untuk mengikat loyalitas elite Honiara. Masuknya kapital masif dari Beijing memberikan amunisi baru bagi rezim yang berkuasa untuk menopang legitimasi politiknya melalui proyek-proyek fisik yang mencolok di tingkat daerah pemilihan.<sup>96</sup> Ketersediaan dana segar ini menciptakan insentif moral yang menyimpang, di mana para politisi semakin terdorong untuk mencari patronase dari aktor eksternal demi mempertahankan basis suara, sebuah langkah yang secara perlahan menggerus integritas dan kedaulatan institusi demokrasi negara.<sup>97</sup>

Dampak destruktif dari jebakan klientelisme yang berupa dependensi Solomon terhadap patron ini merambat jauh melampaui isu elektoral, merusak kapasitas fundamental pemerintah dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan menjaga profesionalitas birokrasi. Karena kelangsungan karier politik lebih ditentukan oleh kemampuan mendistribusikan rente daripada kinerja legislasi, anggota parlemen dan menteri cenderung mengabaikan tugas pembuatan undang-undang atau pengawasan departemen.<sup>98</sup> Erosi tata kelola ini diperparah oleh praktik

---

<sup>95</sup> Fraenkel and Smith, "The Solomons-China 2022 Security Deal: Extraterritoriality and the Perils of Militarisation in the Pacific Islands."

<sup>96</sup> Cavanaugh, *Divided Isles: Solomon Islands and the China Switch*.

<sup>97</sup> Tarcisius Kabutaulaka, "Geopolitical Competition and Solomon Islands : Navigating the Middle Ground," *Devpolicy*, 2023.

<sup>98</sup> Terence Wood, "Poor Political Governance in Solomon Islands – What Use Rational Choice Explanations?," *Devpolicy Blog*, 2012, <https://devpolicy.org/poor-political-governance-in-solomon-islands-what-use-rational-choice-explanations20120821/>.

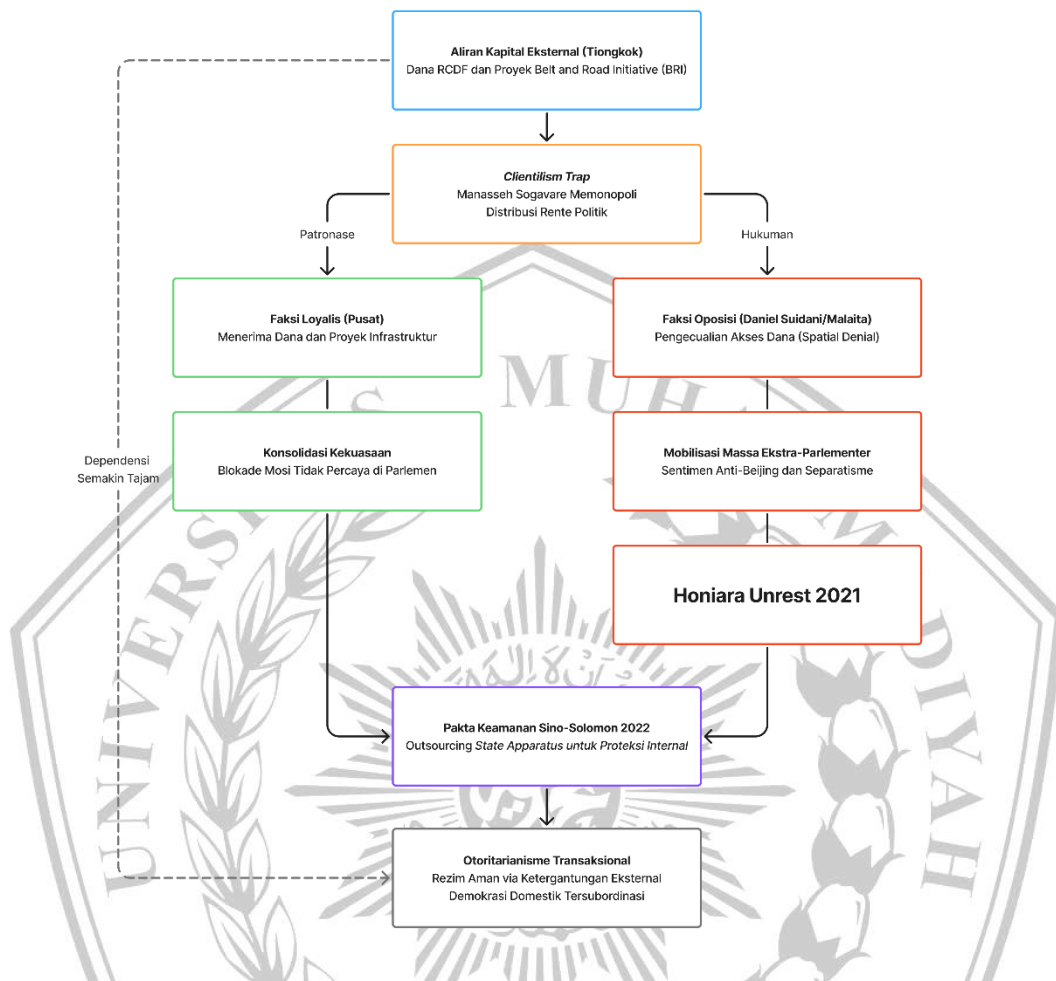
pengangkatan pegawai negeri yang lebih didasarkan pada koneksi politik ketimbang meritokrasi, serta pemberian kontrak pemerintah yang sarat akan nepotisme.

Hasilnya, Kepulauan Solomon terkunci dalam siklus setan di mana klientelisme melahirkan keterbelakangan, dan keterbelakangan itu sendiri justru melanggengkan praktik klientelisme. Di tengah buruknya layanan publik dan absennya jaminan kesejahteraan dari negara, keputusan pemilih untuk mendukung kandidat yang menawarkan bantuan instan menjadi sebuah pilihan yang rasional demi keberlangsungan hidup jangka pendek.<sup>99</sup> Selama struktur ekonomi politik ini tidak direformasi, kebijakan luar negeri Solomon akan terus bersifat rentan dan sangat dependen pada aliran bantuan asing yang siap menyokong kelangsungan hidup politik para elite, menjauhkan negara dari cita-cita pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mandiri. Mekanisme destruktif dari politik transaksional ini pada akhirnya mengunci Kepulauan Solomon dalam sebuah siklus setan yang melanggengkan dirinya sendiri. Dinamika struktural ini dapat dibedah secara konkret melalui visualisasi Model Jebakan Klientelisme berikut.

---

<sup>99</sup> Terence Wood, "Understanding Electoral Politics in Solomon Islands," *CDI Discussion Paper* (Centre for Democratic Institutions, Australian National University, 2014), <https://ssrn.com/abstract=2505265>.

**Alur Mekanisme Implikasi *Clientilism Trap* Terhadap Polarisasi Rezim vs Oposisi Kepulauan Solomon**



Gambar 2 Model Mekanisme *Clientilism Trap* Kepulauan Solomon  
 Sumber: Diolah oleh peneliti

Siklus ini beroperasi melalui tiga simpul kausalitas yang saling mengunci dan mereproduksi keterbelakangan secara terus-menerus. *Pertama*, tingginya ketergantungan pemilih terhadap patronase. Dalam kondisi kemiskinan struktural, konstituen tidak lagi memilih berdasarkan visi pembangunan nasional, melainkan berdasar pada besaran uang tunai, seng atap, atau bantuan material langsung yang didistribusikan melalui dana konstituensi. Bantuan ini menjadi satu-satunya jaring pengaman sosial yang tersedia bagi masyarakat akar rumput.

*Kedua*, politisi memprioritaskan alokasi dana konstituensi dan mengabaikan legislasi nasional. Menyadari bahwa kelangsungan karier politik mereka murni ditentukan oleh kemampuan mendistribusikan rente, para anggota parlemen meresponsnya secara sangat rasional. Mereka memusatkan seluruh energi, waktu, dan manuver politik untuk memperbesar dan mengamankan anggaran konstituensi. Konsekuensi mutlak dari pilihan ini adalah terbengkalainya tugas utama mereka: merumuskan undang-undang, menyusun kebijakan publik makro, dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.

*Ketiga*, buruknya tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Absennya fungsi legislasi dan pengawasan dari parlemen mengakibatkan institusi negara mengalami pembusukan dari dalam. Birokrasi kehilangan arah, korupsi dinormalisasi, dan kualitas pelayanan publik dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur transportasi hancur lebur karena tidak ada kemauan politik untuk memperbaikinya.<sup>100</sup>

Rantai kausalitas ini akhirnya mengulang kembali ke titik awal. Hancurnya pelayanan publik formal akibat kelalaian negara membuat rakyat semakin tidak memiliki alternatif untuk bertahan hidup. Tanpa adanya rumah sakit yang memadai atau lapangan pekerjaan dari pemerintah, rakyat dipaksa untuk kembali dan bergantung lebih dalam lagi pada "kemurahan hati" personal para politisi. Jebakan ini tertutup rapat. Masyarakat terpaksa mempertahankan sistem yang menindas mereka demi bertahan hidup hari ini, sementara elite politik memanfaatkan

---

<sup>100</sup> Mei, "Belt and Road Initiative and Healthy Silk Road : An Alternative Path for Pacific Island Countries to Participate in Global Public Health Governance."

kemiskinan tersebut sebagai alat kontrol elektoral. Pada titik inilah, pencarian sumber dana tanpa syarat dari luar negeri—khususnya melalui persekutuan dengan Beijing—menjadi sebuah keharusan absolut bagi pihak eksekutif guna memastikan mesin klientelisme ini tidak pernah kehabisan bahan bakar.

## **2.4 Ancaman Ketidakpastian Keamanan Regional**

Manuver diplomatik Kepulauan Solomon untuk merapat ke Beijing telah memicu efek domino destruktif yang meruntuhkan arsitektur keamanan tradisional di Pasifik Selatan. Berakhirnya monopoli pertahanan kekuatan Barat pasca-RAMSI tidak serta-merta melahirkan tatanan regional yang lebih otonom, melainkan justru mengonversi kerentanan domestik Honiara menjadi episentrum krisis geopolitik baru. Transformasi doktrin pertahanan negara ini membuktikan sebuah premis kritis: upaya proteksi kelangsungan hidup rezim di tingkat nasional kini telah bermanifestasi menjadi ancaman struktural yang memaksa seluruh entitas di kawasan untuk mengkalkulasi ulang risiko keamanan dan strategi pertahanan mereka.

### **2.4.1 Komodifikasi Kedaulatan demi Keamanan Rezim**

Dalam merespons ancaman pembangkangan sipil dan instabilitas politik domestik, rezim Manasseh Sogavare tidak lagi memandang kedaulatan teritorial sebagai entitas sakral yang harus dibentengi dari campur tangan asing, melainkan menjadikannya sebagai komoditas transaksional. Instrumentalisasi kedaulatan ini mencapai titik kulminasi ketika pakta keamanan bilateral dengan Tiongkok pada tahun 2022 dimanfaatkan sebagai asuransi eksternal untuk meredam potensi pemberontakan internal. Pengalaman traumatis kerusuhan Honiara 2021

memberikan rasionalisasi bagi elite penguasa bahwa kapasitas koersif aparatur domestik sudah tidak memadai untuk menggaransi kelangsungan kekuasaan sentral.

Melalui strategi keberpihakan ganda (*hedging/double alignment*) menjaga asimilasi ekonomi dengan Beijing sembari tetap menekan Canberra untuk terus menyuplai dana pembangunan Honiara secara presisi mengerek nilai tawarnya di pasar diplomatik global. Pada esensinya, strategi ini menunjukkan bahwa instrumen pertahanan negara telah diprivatisasi dengan kata lain kedaulatan "disewakan" kepada arsitek keamanan asing semata-mata demi mengamankan otoritas rezim dari tekanan elektoral dan perlawanan massa konstituennya sendiri.

#### **2.4.2 *Security Dilemma* dan Eskalasi Militerisasi Pasifik**

Keputusan Honiara untuk mengundang aktor keamanan non-tradisional secara langsung menginkubasi *security dilemma* (dilema keamanan) yang akut di antara negara-negara hegemon. Teks pakta keamanan Honiara-Beijing yang dikondisikan rahasia (*strategically opaque*) melahirkan ruang hampa transparansi, yang kemudian ditafsirkan oleh Australia dan Amerika Serikat sebagai ancaman proyektif terhadap kebebasan jalur komunikasi maritim (SLOC) di Pasifik. Manuver yang pada dasarnya diklaim defensif oleh Solomon ini dibaca sebagai ekspansi ofensif oleh poros Barat.

Mekanisme aksi-reaksi ini memaksa kekuatan tradisional mempercepat konsolidasi aliansi pertahanan militeristik, seperti pakta AUKUS, serta melakukan recalibrasi postur armada militer melalui kerangka *Pacific Step-up*. Pergeseran ini secara drastis mentransformasi posisi Kepulauan Solomon, dari sekadar negara

berkembang penerima bantuan kemanusiaan, menjadi katalisator utama remilitarisasi Pasifik. Konsekuensinya, kawasan yang sebelumnya dikelola melalui pendekatan *soft power* kini terseret ke dalam pusaran perlombaan senjata (*arms race*) yang agresif, di mana setiap langkah diplomatik senantiasa dibayangi oleh kalkulasi pencegahan konflik militer berskala luas.

### 2.4.3 Fragmentasi Institusi Regional dan Erosi Norma Demokrasi

Eskalasi persaingan geopolitik ini tidak hanya mendestabilisasi arsitektur keamanan fisik, tetapi juga secara sistematis mendekonstruksi kohesi institusional dan tata nilai demokrasi di kawasan. Secara diplomatik, Honiara memelopori fragmentasi organisasi regional dengan mengeksploitasi platform sub-regional *Melanesian Spearhead Group* (MSG) guna membangun barikade solidaritas etnis. Manuver ini dirancang khusus untuk mendelegitimasi kritik, teguran, maupun desakan transparansi tata kelola yang datang dari forum payung utama, *Pacific Islands Forum* (PIF).

Secara paralel, injeksi modal Beijing yang berkarakteristik *no-strings-attached* (tanpa syarat reformasi kelembagaan) telah mengaburkan demarkasi antara bantuan pembangunan murni dan instrumen koersi politik (*weaponization of aid*). Aliran kapital asing di Kepulauan Solomon tidak lagi berorientasi substantif pada pengentasan kemiskinan, melainkan bermutasi menjadi fasilitas penyokong aparat keamanan yang represif demi melanggengkan jaringan patronase penguasa. Kondisi ini mengesahkan pergeseran permanen tata kelola negara menjauh dari norma demokrasi liberal konstitusional, menjebak Kepulauan Solomon dan

mengancam lingkungan sekitarnya dengan tatanan otoritarianisme transaksional yang rentan krisis.

